

Policy Brief

MENAKAR TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SECARA SEIMBANG: SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA

Muladno^{1,2)}, Salim E¹⁾, Adnyana I.K³⁾, A. Suprayogi²⁾, H. Triwidodo²⁾, Amiyana C⁴⁾, dan A. Antonio⁵⁾

¹⁾Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; ²⁾Institut Pertanian Bogor; ³⁾Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi;

⁴⁾Pemda Kabupaten Bandung; ⁵⁾Komunitas Peternak Unggas Nasional

No.11 Juni 2025

ISSN . 2716-4764

PESAN UTAMA

- Tridarma Perguruan Tinggi dimaknai sebagai tridarma dosen sehingga dalam meniti karir jabatan akademis dosen, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor, setiap dosen harus melakukan kegiatan tridarma. Namun sampai saat ini pembobotan ke-tiga tridarma tersebut masih terasa tidak proporsional atau tidak seimbang. Darma kesatu [pendidikan/pengajaran] wajib dipenuhi dengan porsi minimal 40%, darma kedua [penelitian] minimal 40%, dan darma ketiga [pengabdian kepada masyarakat] maksimal 20% dari total kegiatan untuk kenaikan setiap jenjang akademis.
- Pelaku utama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia adalah komunitas rakyat agromaritim [petani, peternak, nelayan/pembudidaya ikan, dan pekebun] yang mayoritas berlatar pendidikan maksimal SMP sehingga mereka memerlukan pendampingan intensif, terukur, dan tersistem dari perguruan tinggi melalui kegiatan darma ketiga.
- Kegiatan tridarma perguruan tinggi sejatinya harus dilakukan secara utuh dan tidak dapat dipisahkan diantara tiga darma tersebut. Keutuhan tridarma diilustrasikan bahwa darma pendidikan menghasilkan insan yang menguasai serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui darma penelitian. Hasil penelitian dengan segera dihantarkan kepada masyarakat khususnya komunitas rakyat agromaritim melalui kegiatan darma pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pencapaian swasembada pangan.
- Mengingat kondisi di atas, maka praktik pelaksanaan tridarma di perguruan tinggi pada akhirnya berlangsung tidak seimbang, dan terfokus pada kegiatan pendidikan dan penelitian. Terutama pada kegiatan penelitian, pada umumnya dosen banyak melakukannya namun kebanyakan berakhir dengan terbitnya publikasi ilmiah berskala nasional atau internasional dengan dampak kemanfaatannya terhadap komunitas rakyat agromaritim belum signifikan.
- Kewajiban dosen untuk melakukan tridarma perguruan tinggi harus diatur secara seimbang berdasarkan *passion* (kecintaan) dosen untuk berprofesi [menjadi profesor] yang berorientasi penelitian atau berorientasi pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap dosen dapat mengembangkan talentanya sebagai pencipta teknologi [kuat pada darma kedua] atau sebagai penghantar teknologi dari perguruan tinggi kepada komunitas rakyat agromaritim [kuat pada darma ketiga] dengan tidak meninggalkan tugasnya sebagai pendidik [sama pada darma kesatu].

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mencantumkan bahwa tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. *Tridarma Perguruan Tinggi* dalam struktur akademik tersebut perlu dijalankan secara seimbang. Hal ini guna memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan didalamnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun, yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa darma pengabdian kepada masyarakat belum mendapat perhatian yang setara dengan darma pendidikan dan darma penelitian. Adanya ketimpangan ini secara langsung memberi pengaruh terhadap efektivitas peran perguruan tinggi dalam kontribusinya terhadap agenda nasional, yakni *swasembada pangan*.

Kondisi Tridarma Perguruan Tinggi dan Posisi Pengabdian Masyarakat

Dibandingkan dengan darma pendidikan dan penelitian, darma pengabdian kepada masyarakat masih dianggap sebagai kegiatan tidak penting. Kurang lebih hanya 4% dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pengajuan proposal penelitian yang mencapai 17% (Dirjen risbang 2025). Fakta ini memperlihatkan bahwa apresiasi terhadap pengabdian masyarakat masih rendah dalam sistem akademik yang ada. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi karir akademik dosen, tetapi juga memberikan dampak pada efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang seharusnya berbasis ilmu pengetahuan (*science-based policy*).

Di sisi lain, yang perlu disorot adalah perubahan paradigma dalam ekosistem perguruan tinggi. Pengoptimalan peran akademisi untuk hadir secara aktif di lapangan dengan pendekatan *riset aksi holosentrik* merupakan model ideal. Akademisi terlibat langsung bersama komunitas rakyat agromaritim dalam mencari solusi permasalahan di lapangan yang berbasis pada keilmiah. Dengan demikian penerapan hasil riset akan melibatkan masyarakat secara lebih intensif, tidak hanya berhenti pada bentuk publikasi ilmiah, namun memiliki pengaruh nyata.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu adanya *revisi* sistem penilaian dalam penjenjangan jabatan akademik bagi dosen. Dрма pengabdian kepada masyarakat seharusnya lebih dihargai atau setara dengan darma penelitian. Regulasi yang ada saat ini masih memposisikan pengabdian masyarakat dalam angka minimal (Permendikbudriset 2024) sehingga dosen dan institusi tidak memprioritaskan pengembangan program berbasis komunitas rakyat.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, peran krusial pemerintah dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih progresif.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah

Peran Pemerintah dan Potensi Hubungan dengan Perguruan Tinggi

merancang beberapa program diantaranya *Kosabangsa*, yang bertujuan untuk mewadahi hasil inovasi perguruan tinggi yang kemudian disalurkan kepada masyarakat secara nyata. Efektivitas program ini juga bergantung pada penataan kebijakan pendidikan tinggi yang memposisikan pengabdian masyarakat tidak lagi sebagai pelengkap, melainkan menjadi salah satu pilar utama dalam Tridarma Perguruan Tinggi (Permendikisaintek 2024).

Kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi harus mengacu pada model integratif yang lebih sistematis. Perguruan tinggi perlu memperoleh intensif yang cukup untuk mendorong lebih banyak akademisi yang terjun dalam pengabdian berbasis komunitas. Di sisi lain, kebijakan pemerintah wajib memastikan bahwa pendekatan *science-based policy* harus diimplementasikan dalam program pembangunan, terutama dalam agenda swasembada pangan.

Indonesia berpotensi besar dalam mewujudkan swasembada pangan. Tidak hanya berorientasi pada produksi, namun juga keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan yang basisnya ilmiah.

Keberadaan Pengabdian Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Sejak era kolonial, secara historis, pendidikan di Indonesia berorientasi lebih kuat pada peningkatan kemampuan intelektual individu dibandingkan dengan pemberdayaan sosial. Perguruan tinggi tidak diarahkan untuk menekankan keterlibatan nyata dari komunitas dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Keberadaan pengabdian masyarakat seharusnya tidak sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan, tetapi bagian integral yang harus berjalan sejajar dengan pendidikan dan penelitian.

Indonesia merupakan negara berkembang yang kian menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks, maka pendekatan pendidikan yang ada seharusnya tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengaplikasikan ilmu untuk memecahkan masalah bangsa. Akademisi diharapkan menjadi agen perubahan, bukan sekadar pencari ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi harus membebaskan masyarakat dari ketidakadilan dan ketimpangan.

Pengabdian kepada masyarakat menjadi krusial dalam konteks swasembada pangan. Sejarah telah menunjukkan efektivitas peran akademisi dalam menghadapi krisis pangan seperti yang terjadi pada tahun 1960-an. Penyelesaian permasalahan pada kala itu adalah akademisi terjun langsung ke masyarakat, membimbing petani dalam penggunaan teknologi pertanian, serta mengembangkan bibit unggul yang menjadi solusi bagi ketahanan pangan nasional. Berdasarkan refleksi dari pengalaman tersebut, maka dapat dipahami bahwa swasembada pangan tidak hanya persoalan produksi, tetapi juga persoalan ilmu, inovasi, dan pemberdayaan.

Sistem pendidikan di Indonesia ke depan harus mengubah paradigmanya. Perguruan tinggi harus mulai menghasilkan individu-individu yang siap menjadi agen transformasi di masyarakat. Peran strategis pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung keseimbangan dalam Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk memberikan apresiasi lebih besar

terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Integrasi darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menjadikan Indonesia berpeluang besar dalam mewujudkan sistem pendidikan yang menghasilkan perubahan nyata bagi permasalahan nasional. Darma pengabdian kepada masyarakat didorong menjadi komponen utama yang membuat perguruan tinggi dapat menjadi pusat inovasi iptek yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam isu swasembada pangan.

PERMASALAHAN

Ketidakseimbangan Tridarma Perguruan Tinggi dan Implikasinya bagi Masyarakat

Struktur kebijakan yang menempatkan pengabdian masyarakat sebagai elemen sekunder dengan bobot kecil mengakibatkan perguruan tinggi lebih fokus pada indeks publikasi dan pemeringkatan internasional. Pengabdian kepada komunitas masyarakat seringkali hanya menjadi formalitas dalam laporan kinerja akademik.

Ketimpangan ini secara langsung memberikan dampak nyata, terutama kepada komunitas rakyat agromaritim yang membutuhkan pendampingan berbasis ilmiah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Implementasi kebijakan swasembada pangan seringkali tidak optimal, di mana banyak program gagal karena minimnya integrasi ilmu pengetahuan dalam pelaksanaannya.

Kurangnya Perhatian terhadap Komunitas Rakyat dalam Regulasi dan Sistem Pendidikan

Mayoritas regulasi yang mengatur pendidikan tinggi masih berorientasi secara individual, bukan perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya diposisikan sebagai kewajiban institusional, bukan sekadar pilihan dosen secara individu. Dibutuhkan keharusan bagi perguruan tinggi untuk secara sistematis memiliki program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan berbasis komunitas, di mana sumber daya yang sebagian besar masih diarahkan kepada penelitian dengan orientasi internasional harus mulai secara seimbang dapat diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri (nasional, regional, atau lokal).

Ketidakseimbangan Berpengaruh Nyata Terhadap Keselamatan, Kebebasan, dan Kesejahteraan Masyarakat Agromaritim

Minimnya kehadiran perguruan tinggi dalam mendampingi komunitas rakyat juga dapat berpengaruh pada rentannya posisi mereka dalam sistem ekonomi dan hukum. Beberapa kasus hukum yang menimpa rakyat kecil karena keterbatasan pengetahuan dan tanpa pendampingan dari akademisi berdampak buruk pada kinerja pemerintah juga pada akhirnya.

Regulasi yang tidak memiliki dasar ilmiah seringkali tidak berdasarkan pada fakta di lapangan. Selain itu, penafsiran kebijakan yang tidak berbasis akademik dapat berujung kepada tindakan hukum yang akan mengancam keselamatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini semakin

memperburuk ketidakadilan bagi masyarakat agromaritim (Ali 2025).

Ketidakhadiran akademisi dalam ekosistem kebijakan juga menyebabkan minimnya dukungan bagi rakyat kecil dalam menghadapi sistem hukum dan regulasi yang tidak berpihak kepada mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karenanya, menjadi sangat dibutuhkan partisipasi akademisi dalam proses kebijakan tersebut. Hal ini guna memastikan bahwa regulasi yang diatur berdasarkan kajian ilmiah dan berpihak pada keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat.

Tanpa dukungan ilmiah dan advokasi dari perguruan tinggi, masyarakat yang terlibat dalam program pemerintah dapat memiliki resiko cukup tinggi dan mengalami ketidakadilan sistemik yang merugikan keselamatan, kebebasan, dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan serta menjamin perlindungan bagi petani dan peternak, perguruan tinggi perlu berperan lebih aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Reformasi kebijakan penyelenggaraan tridarma menjadi krusial agar pengabdian masyarakat memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan dan penelitian. Dengan demikian akademisi dimungkinkan berkontribusi lebih banyak melalui pendampingan, advokasi, dan penyelesaian berbasis ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Reorientasi Tridarma Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan Tridarma perlu adanya penguatan, terutama dengan mendorong kegiatan pendidikan dan penelitian untuk dapat hadir bersama masyarakat agromaritim dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agromaritim. Kegiatan pengabdian ini harus dapat diselenggarakan dengan nyata dan berdampak di lapang (lokus dan fokus). Kegiatan pengabdian yang demikian dapat terwujud dilaksanakan secara sinergis serta berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu utamanya pemerintah dan swasta dengan prinsip berbagi peran dan tanggungjawab serta berbagi sumberdaya (*Resource Sharing*), sebagai upaya.

Penguatan dan pemberdayaan komunitas rakyat agromaritim berkelanjutan berorientasi pada pengembangan bisnis. Dengan adanya reorientasi tridarma ini, maka komunitas rakyat dapat ditempatkan sebagai subjek dan bukan sebagai objek, mereka merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perancangan program. Selain itu, kebijakan anggaran lebih tepat jika bersifat *multi-year* agar dampaknya dapat terukur dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Konsep Dan Paradigma Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memegang peran sentral dalam mengimplementasikan hakikat Tridarma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus mampu memastikan keseimbangan ketiganya, agar memberikan dampak yang nyata dan bermanfaat bagi publik. Dalam paradigma ini, ilmu pengetahuan/teknologi/inovasi yang merupakan produk perguruan tinggi, harus berfungsi sebagai gerbong lokomotif, yaitu pendorong utama dalam penyelenggaraan Tridarma yang dinamis dan terarah.

Sebagai penggerak dalam perkembangan ilmu pengetahuan,

perguruan tinggi perlu mengelola riset secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Selain berfungsi sebagai pusat akademik, perguruan tinggi juga berperan sebagai institusi yang mampu menciptakan solusi berbasis teknologi yang dapat langsung diterapkan. Model inovasi ini tidak boleh terbatas pada publikasi ilmiah semata, tetapi harus mendorong penerapan solusi secara nyata di masyarakat.

Paradigma baru, di mana dosen dan mahasiswa secara aktif membangun ekosistem penelitian yang berdampak langsung kepada komunitas sangat dibutuhkan. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading, tetapi lebih sebagai penggerak utama perubahan sosial dan ekonomi.

Perlu adanya strategi regulasi konkrit untuk menghantarkan inovasi para akademisi kepada masyarakat. Beberapa pendekatan strategi regulasi dalam menghantarkan inovasi.

1. Pendekatan berbasis komunitas

Perguruan tinggi harus membangun platform yang memudahkan masyarakat dalam akses inovasi secara langsung. Model seperti Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) (Muladno *et al.* 2019) telah membuktikan efektivitas pendekatan ini dengan membentuk jaringan edukasi berbasis komunitas (Gravita *et al.* 2025).

2. Integrasi dengan kebijakan berbasis sains (*science-based policy*)

Regulasi yang ada harus memastikan adanya keberlanjutan dan pemanfaatan atas inovasi di masyarakat, bukan sekedar inovasi hanya untuk perguruan tinggi dalam lingkup kondisi akademik semata. Model Hipermadani (hilirisasi inovasi perguruan tinggi untuk masyarakat dan petani) menunjukkan bahwa pendekatan terpadu dapat mempercepat diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berguna bagi komunitas (Suprayogi, 2025).

3. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan praktik langsung

Inovasi yang baik adalah yang dapat diterima dan diadaptasi oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menerapkan model edukasi berbasis praktik, seperti program pelatihan dan pendampingan intensif. Mahasiswa dan dosen harus memiliki pengalaman langsung dalam mentransformasikan hasil penelitian mereka menjadi solusi nyata di lapangan.

Pelaksanaan model-model tersebut di atas menjadikan inovasi perguruan tinggi benar-benar diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hakikat Tridarma Perguruan Tinggi dapat direalisasikan secara seimbang, menjadikan pendidikan tinggi sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan teknologi di Indonesia.

Perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab dalam mencetak lulusan yang kompeten, tetapi juga harus berkontribusi langsung dalam menyelesaikan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Maka Tridarma Perguruan Tinggi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan serta perubahan pola pikir dalam sistem akademik guna memastikan bahwa pengabdian masyarakat memperoleh porsi yang lebih proporsional setara dengan pendidikan dan penelitian.

4. Riset Aksi Holosentrik: membumikan perguruan tinggi

Riset aksi holosentrik merupakan pendekatan yang membawa perguruan tinggi ke pusat permasalahan (Triwidodo 2022), tidak hanya mengangkat permasalahan untuk diselesaikan dalam ruang akademik saja. Pendekatan ini berbeda dengan metode teknokratis yang sering kali mengisolasi penelitian dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip utama dari riset aksi holosentrik adalah peneliti, akademisi, dan komunitas terlibat langsung di lokasi permasalahan, sehingga tidak lagi hanya mengamati dari jauh, tetapi tinggal dan bekerja di masyarakat untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan secara holistik. Interaksi antar-pihak menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa pendekatan ilmiah dipadukan dengan praktik lokal.

Salah satu contoh penerapan riset aksi holosentrik adalah penelitian yang dikembangkan untuk mengatasi serangan hama penggerek batang padi putih. Jika menggunakan model penelitian tradisional, masalah diangkat dan diteliti di perguruan tinggi, kemudian publikasi ilmiah dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium, sedangkan petani mendapatkan informasi setelah penelitian selesai. Sebaliknya, dalam model riset aksi holosentrik, perguruan tinggi langsung tinggal di daerah terdampak dan berinteraksi dengan petani, penelitian dilakukan secara kolaboratif di lapangan, serta solusi diterapkan langsung di lokasi permasalahan tanpa menunggu publikasi ilmiah terlebih dahulu. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengembangkan metode pemetaan serangan hama yang lebih efisien, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan metode tradisional.

Dalam penerapan riset aksi holosentrik, salah satu kendala terbesar adalah alokasi waktu bagi dosen. Oleh karenanya, sistem *reward* perlu dibuat yang memungkinkan dosen menghabiskan waktu tertentu di lapangan tanpa kehilangan kesempatan akademik. Selama satu semester penuh, dosen dapat tinggal di komunitas di mana dalam periode tersebut mereka tidak hanya mengajar atau meneliti, tetapi juga berada di lokasi permasalahan secara langsung. Dampak dari pengabdian kepada masyarakat sudah harus mulai dipertimbangkan dalam penilaian akademik. Keberhasilan dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dianggap sebagai prestasi akademik yang setara dengan publikasi ilmiah. Insentif bagi dosen yang aktif dalam riset aksi holosentrik juga perlu dikembangkan, tidak hanya berupa tunjangan, tetapi juga pengakuan akademik dalam sistem kenaikan pangkat dan jenjang karir.

Riset aksi holosentrik merupakan pendekatan yang mampu mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat,

menjadikan ilmu pengetahuan sebagai solusi nyata bagi permasalahan masyarakat. Kontribusi akademisi langsung di lapangan akan meningkat dengan adanya alokasi waktu dinamis untuk dosen tersebut.

Swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dapat terwujud jika perguruan tinggi mengubah paradigma akademik yang mengedepankan pengabdian masyarakat sebagai bagian utama dari Tridarma Perguruan Tinggi.

Posisi Masyarakat dan Harapan Keterlibatan Akademisi

Saat ini, peternak rakyat menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tercermin dalam ekosistem industri unggas di Indonesia. Rendahnya daya tawar peternak rakyat dalam rantai distribusi pangan menjadi salah satu isu utama. Saat ini, harga ayam hidup di tingkat peternak sering kali jauh di bawah biaya produksi, sementara harga di pasar tetap stabil atau bahkan meningkat. Ketidakseimbangan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan usaha peternak rakyat tetapi juga merugikan ekonomi lokal yang menjadikan sektor peternakan sebagai tumpuan utama.

Peternak rakyat masih saja terjebak dalam sistem yang membuat mereka terpinggirkan ketika seharusnya menjadi subjek utama. Banyak dari mereka bermitra dengan perusahaan integrasi vertikal, yang mengendalikan produksi dan distribusi. Peternak tidak ubahnya sebagai tukang kandang sehingga tidak memiliki kemandirian dan sulit menentukan harga jual sendiri.

Dalam hal ini diperlukan keterlibatan akademisi untuk membantu mengatasi persoalan, baik dalam hal penguatan daya tawar peternak, analisis pasar, maupun inovasi dalam sistem agribisnis berbasis rakyat.

Peran strategis akademisi dibutuhkan dalam beberapa aspek penting. Pertama, akademisi dapat meneliti pola distribusi dan regulasi harga untuk menciptakan keseimbangan antara peternak rakyat dan pasar. Mekanisme pasar unggas, termasuk peran kartel, skema distribusi, dan dampak regulasi terhadap harga di tingkat peternak membutuhkan kajian yang mendalam. Kedua, akademisi juga dapat berperan sebagai pendamping dalam penerapan teknologi dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi agar peternak rakyat dapat menjalankan sistem produksi unggas yang lebih efisien, termasuk model peternakan kolektif yang mampu meningkatkan daya saing peternak rakyat. Ketiga, akademisi dapat mendukung konsep koperasi atau kolaborasi berbasis rakyat yang memungkinkan peternak rakyat bersatu dalam menentukan harga dan kebijakan usaha mereka. Pengembangan platform digital untuk menjual hasil produksi langsung ke konsumen tanpa perantara juga perlu dikaji.

Selain itu, akademisi harus ikut serta dalam penciptaan kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat. Forum rutin antara akademisi, pemerintah, dan peternak rakyat diperlukan untuk menyusun solusi nyata. Dengan keterlibatan intensif dari

nasional. Mereka hanya menginginkan sistem yang lebih transparan dan berkeadilan di mana peternak rakyat tidak hanya menjadi buruh di kandangnya sendiri, melainkan mampu mengelola usahanya dengan daya tawar yang lebih kuat.

Posisi Pemerintah dan Potensi Keterlibatan dalam Penguatan Tridarma Perguruan Tinggi

Keseimbangan Tridarma Perguruan Tinggi juga tidak luput dari peran strategis pemerintah daerah yang berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung antara akademisi, masyarakat, dan sektor industri. Dalam ekosistem pembangunan, regulasi yang tepat diperlukan untuk memberikan ruang bagi akademisi agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam program-program berbasis masyarakat.

Wewenang pemerintah adalah menentukan kebijakan yang memastikan keberlanjutan ekosistem pertanian, peternakan, dan usaha rakyat bidang lainnya, termasuk perlindungan harga komoditas, insentif bagi petani dan peternak, serta pengawasan distribusi pangan. Selain itu, pendanaan melalui hibah dan alokasi anggaran perlu diperluas agar program pengabdian kepada masyarakat lebih optimal dan tidak menjadi proyek jangka pendek.

Pendekatan Pentahelix diperlukan, yang mengintegrasikan akademisi, pemerintah, industri, komunitas, dan media untuk membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menjembatani sinergi antara akademisi dan komunitas rakyat melalui inovasi yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu hal konkret yang dilakukan adalah penguatan model koperasi dan kelompok tani sebagai struktur yang memungkinkan komunitas rakyat untuk lebih berdaya dalam rantai pasok pangan. Peran strategis dalam mendorong implementasi kebijakan berbasis ilmiah juga dibutuhkan, guna pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh penelitian yang komprehensif.

Selain itu perguruan tinggi perlu mendapatkan ruang dari pemerintah untuk berperan secara signifikan dalam perumusan kebijakan dan program daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme pendampingan berbasis ilmiah di mana akademisi berkontribusi langsung dalam pengembangan regulasi serta evaluasi kebijakan. Program berbasis komunitas seperti Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dapat menjadi contoh konkret bagaimana akademisi dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan dukungan pemerintah.

Kemitraan yang terjalin antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah akan mendorong ekosistem inovasi yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat penelitian, tetapi juga menjadi mitra utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perguruan tinggi dan peternak rakyat bisa mendapatkan hak yang lebih adil dalam ekosistem pangan

Untuk mencapai takaran yang seimbang pada pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, reformasi kebijakan perlu dilakukan guna menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem akademik. Penilaian terhadap pengabdian masyarakat harus ditingkatkan dalam evaluasi akademik sehingga setara dengan pendidikan dan penelitian. Dengan demikian dosen mendapat apresiasi lebih pada kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Keaktifan dan kreatifitas perguruan tinggi dalam mendampingi komunitas rakyat agromaritim sangat diharapkan melalui berbagai pendekatan strategi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian ilmu pengetahuan, teknologi maupun inovasi perguruan tinggi dapat diimplementasikan segera serta memastikan kegiatan pengabdian masyarakat benar-benar berdampak dengan adanya keterlibatan langsung akademisi di lapangan.

Regulasi yang mendorong kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat perlu diupayakan oleh Pemerintah. Kebijakan berbasis ilmiah harus menjadi pegangan dalam program pembangunan, memastikan bahwa akademisi tidak hanya berperan sebagai peneliti, tetapi juga sebagai mitra strategis komunitas rakyat dalam memberikan solusi yang terdapat di masyarakat.

Pengabdian masyarakat juga perlu didukung skema pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekosistem yang memungkinkan akademisi terlibat dalam program jangka panjang membutuhkan dukungan dari pemerintah dan industri yang diarahkan secara tepat, sehingga hasil penelitian dan inovasi dapat diterapkan secara optimal.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan komunitas perlu diperkuat melalui sebuah pendekatan integrasi horizontal. Perguruan tinggi harus berperan sebagai pusat pengembangan ilmu yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kesetaraan dalam tridarma dapat dilakukan dengan pentahapan penjenjangan karir akademik yaitu tahap satu untuk mencapai jabatan akademik lektor kepala dan tahap dua untuk menentukan jabatan akademik professor. Proporsi tridarma untuk tahap 1 adalah minimal 50% darma pendidikan; maksimal 40% darma penelitian atau maksimal 40% darma pengabdian. Proporsi tridarma untuk tahap 2 berubah menjadi minimal 30% darma pendidikan; minimal 50% darma penelitian dan harus ada darma pengabdian bagi dosen yang ingin menjadi profesor berorientasi penelitian; minimal 50% darma pengabdian dan harus ada darma penelitian bagi dosen yang ingin menjadi profesor berorientasi pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian kriteria penilaian bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditambah jenis dan pola aktifitasnya yang setara dengan kriteria penilaian pada darma lain yaitu

darma pendidikan dan darma penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2025, April). Guru Besar IPB siap jadi penjamin JS tersangka kasus dugaan korupsi korporasi sapi di Kediri. *Montera*.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2024). *Laporan evaluasi program hibah 2024*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2021. *Petunjuk teknis program hibah tahun 2021*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Riset & Pengembangan. (2025). *Kebijakan dan Program DPPM dalam Riset & Pengabdian kepada Masyarakat*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Gravita, N. A., Putra, B. W., & Muladno. (2025). The impact of SPR program on its alumni in Lamongan District, East Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1471(1), 012037. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1471/1/012037>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Muladno, S., Sjaf, S., Prastowo, & Suprayogi, A. (2019). *Sekolah Peternakan Rakyat-1111 Institut Pertanian Bogor (SPR-IPB)*. IPB Press.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Saman. (2025, April). Kejaksaan Negeri Kab. Kediri tetapkan tersangka korupsi hibah korporasi sapi 2021-2022. *Sekilas Media*.
- Suprayogi, A. (2023). Model Hiper-Madani: Hilirisasi Inovasi Perguruan Tinggi untuk Masyarakat dan Petani. *Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*.
- Triwidodo, H. (2022, Mei 21). *Riset aksi holosentrik untuk mengatasi ledakan hama*. Orasi Ilmiah Guru Besar, Institut Pertanian Bogor.



Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) adalah sebuah lembaga mandiri yang menghimpun para ilmuwan terkemuka Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.8/1990 dan berdomisili di Ibukota negara. AIPI diberi amanat untuk (i) memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat, (ii) memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan keunggulannya melalui pertemuan dan forum ilmiah, dan (iii) menjalin kerjasama nasional dan internasional untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (aipi.or.id)



Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berkedudukan di Bogor. Sebelum diresmikan pada tahun 1963, IPB adalah sebuah fakultas pertanian pada Universitas Indonesia. Pada tanggal 1 September 1963. Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian Institut Pertanian Bogor sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri. Saat ini, Rektor IPB untuk periode 2017-2022 adalah Prof. Dr. Arif Satria, S.P, M.Si. Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 7 November 2017, BAN-PT memutuskan bahwa Institut Pertanian Bogor (IPB) memperoleh status terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik).



Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) adalah asosiasi pemersatu dalam kegiatan pengabdian dan peningkatan profesionalisme dosen. Adapun visi ADPI adalah menjadi asosiasi terbesar di Asia Tenggara di bidang pengabdian dan peningkatan profesionalisme dosen berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga saat ini, keanggotaan ADPI sudah tersebar dari Aceh hingga Papua yang mencapai lebih dari 2000 dosen yang berasal dari ratusan Perguruan Tinggi di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Rusia, Australia, Kosovo, Portugal, Inggris, Palestina, Tanzania, Nigeria, dan Mesir. ADPI memiliki kepengurusan Pusat di Padang, Sumatera Barat dan Kepengurusan Wilayah di 34 Provinsi di Indonesia dan Malaysia. Asosiasi Dosen "PkM" Indonesia (ADPI) ini berdiri pada tanggal 27 Oktober 2017 di Sumatera Barat bersamaan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "National Seminar on English and Halal Tourism in West Sumatra" yang diselenggarakan di Mapolres Padang Pariaman. Tekad pendirian asosiasi ini dibulatkan pada acara "Temu Ramah dan Konsolidasi ADPI" di UPI Hibition Hall Padang pada Selasa, 17 September 2019. ADPI berbadan hukum No. AHU-0004391.AH.01.04. tahun 2019.



SAINS-X merupakan kependekan dari nama empat organisasi SASPRI (Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia), AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), INS (Instiut Pertanian Bogor, dan X/ILDEX (International Livestock, Dairy, Meat Processing & Aquaculture Exposition). Keempat organisasi tersebut mendeklarasikan diri untuk bersinergi dalam berbagai kegiatan keilmuan yang memberi manfaat kepada masyarakat luas pada 28 Februari 2025 lalu di International IPB Convention Centre, Bogor. Saat ini pendirian organisasi ini melalui akte notaris sedang dalam proses untuk selanjutnya didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia.